**ABSTRAK**

pelayanan terpadu satu pintu merupakan trobosan dalam mempermudah proses sebuah perizinan. Pengurusan izin yang dulu terkesan berbelit-belit, lama serta tidak transaparan, dengan adanya sebuah pelayanan terpadu satu pintu yang mengubah sebuah alur proses terbitnya sebuah izin menjadi lebih mudah diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat lokal maupun mancanegara untuk menanamkan saham pada pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pasal 4 mengatur tentang penyederhanaan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

Pelaksanaan magang yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana dari implementasi sebuah penyederhanaan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentnag pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi berbagai hambatan dalam setiap proses pelayanan serta apa sanksi yang diberikan oleh Dinas terkait terhadap masyarakat yang belum memiliki IMB. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara , dokumentasi dan observasi. Teori implementasi yang digunakan yaitu teori implementasi dari edward III dengan indikator komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Analisis data dilaksanakan menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan mengenai implementasi permendagri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten lombok utara telah melakukan sebuah penyederhanaan pelayanan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik berupa pemusatan sebuah bentuk perizanan pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat serta kejelasan biaya yang dibebankan kepada pemohon berupa retribusi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten lombok utara nomor 6 tahun 2010.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan

**ABSTRACT**

one-door integrated service is a breakthrough in facilitating the process of a permit. Arrangement of permits that once seemed to be convoluted, long and non transparent, with a one-stop integrated service that changed a process flow of a permit to be more easily expected to increase the interest of local and foreign communities to invest shares in the government of North Lombok regency. Based on the regulation of the Minister of Home Affairs No. 24 of 2006 on guidelines for the implementation of one-stop integrated service in Article 4 regulates the simplification of a service performed by the local government of regencies / municipalities in improving the quality of public services.

Implementation of the apprenticeship has been conducted to know how from the implementation of a simplification of services performed by the Local Government of Regency / City based on the regulation of the Minister of Home Affairs No. 24 of 2006 concerning the guidance of the implementation of one-stop integrated service and the efforts of the Local Government of North Lombok Regency through the Department of Power One-door Integrated Investment and Service Work in overcoming various obstacles in every service process and what sanction given by related Office to society which do not have IMB yet. The research used qualitative method with inductive approach. Data collection using interview technique, documentation and observation. The implementation theory used is implementation theory from edward III with indicator of communication, resources, executor attitude, and bureaucratic structure. Data analysis was conducted using Miles and Huberman's theory of data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the results of the analysis that the authors do about the implementation of permendagri number 24 of 2006 on guidelines for the implementation of one-stop integrated service, it can be concluded that the local government of north lombok regency has done a simplification of services in improving the quality of public services in the form of concentration of the form of permission at the Office of Manpower Investment and One Stop Integrated Services and provide easy access to information to the public and the clarity of fees charged to applicants in the form of user charges in accordance with the regulation of north lombok district number 6 of 2010.

Key word: Policy Implemtation